

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyuluhan pertanian merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan, dimulai dari pemahaman situasi petani saat ini dan bergerak menuju pencapaian tujuan yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kepentingan mereka. Penyuluhan bertujuan untuk menyebarkan ide-ide inovatif agar petani tertarik dan menerapkannya dalam praktik bertani. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai suatu bentuk pembelajaran yang terjadi melalui interaksi antara penyuluh dan petani, dengan tujuan meningkatkan produktivitas usaha pertanian, pendapatan, kesejahteraan, dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Penyuluh pertanian dianggap berhasil melakukan tugas pokoknya jika dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006, tugas utama penyuluh pertanian mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan kegiatan penyuluhan. Dengan demikian, penyuluhan pertanian bukan hanya sebagai penyampaian informasi tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang melibatkan kolaborasi antara penyuluh dan petani.

Kinerja penyuluh pertanian dirasakan mulai menurun sejak berlakunya otonomi daerah. Penyuluh pertanian banyak yang beralih fungsi menjadi pejabat struktural atau tetap menjadi penyuluh pertanian tetapi tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada awalnya penyuluh pertanian merupakan aparat pusat yang bekerja di daerah untuk membantu petani di pedesaan. Kegiatan pertanian saat ini mengarah kepada pengembangan agribisnis. Untuk menjalankan agribisnis

diperlukan pembinaan bagi petani yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya agar mereka mampu mengelola usahatani. Kualitas petani dalam menjalankan agribisnis sangat tergantung kepada kinerja penyuluh yang langsung melakukan pembinaan kepada petani dilahan usaha taninya.

Penyuluh pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik penyuluh yang berkinerja baik dapat memosisikan dirinya sebagai motivator, edukator, fasilitator dan dinamisator yang berdampak pada perubahan perilaku petani dalam berusahatani. Untuk itu penyuluh pertanian perlu memiliki berbagai kemampuan, antara lain: kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, berpengetahuan luas, bersikap mandiri dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan karakteristik dan kepentingan petani. (Bahua, 2016). Kinerja penyuluh lapangan merupakan kriteria penilaian atas keseluruhan kegiatan kerja yang telah dilakukan untuk kemudian dibandingkan dengan kesesuaian target yang ingin dicapai melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), beberapa penelitian juga membahas mengenai kinerja penyuluhan pertanian. Menurut Tandibato *et al.*, (2021) menunjukkan seberapa baik kinerja penyuluh pertanian, yang dapat ditentukan dengan melihat tugas utama yang menjadi tanggung jawab mereka, yang hasilnya positif karena kegiatan penyuluhan pertanian hanya berkonsentrasi pada operasi pertanian inti. Misalnya, program pertanian, pertemuan teknis, pameran, dan kursus petani. Selain itu menurut pendapat Ellyta *et al.*,(2021) tanggung jawab penyuluh sebagai konselor, penyelenggara, teknisi, penghubung, dan katalisator pembaruan lebih dari cukup bagi petani, sedangkan menurut Banunaek *et al.*,(2017), meningkatkan efektivitas penyuluh dengan

menitikberatkan pada unsur spesifik penyuluh, psikologi, perencanaan, dan lingkungan kerja penyuluh pertanian.

Mencermati keadaan yang terjadi pemerintah pusat mengambil tindakan berupa program revitalisasi penyuluh pertanian yang memberikan semangat baru bagi para penyuluh, apalagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang system penyuluh pertanian dan rencana adanya standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sehingga jabatan penyuluh pertanian tidak hanya merupakan jabatan fungsional tetapi juga jabatan profesi. Beberapa daerah tingkat Propinsi dan Kabupaten sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sehingga memberi semangat kepada para penyuluh pertanian untuk kembali mengaktivasi diri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyuluh pertanian mitra sekaligus guru bagi petani dalam mengelola usahatani. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/Menpam/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya bahwa tugas pokok Penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluh pertanian, evaluasi dan pelaporan, pengembangan Penyuluhan Pertanian, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan penyuluhan pertanian dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Jumlah penyuluh pertanian yang ada di Indonesia saat ini sedikit demi sedikit mulai berkurang. Penyuluh yang ada jumlahnya tidak sesuai dengan desa binaan yang terdapat di wilayah tersebut. Seperti jumlah penyuluh pertanian yang berada di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Penyuluh Pertanian (PNS, THLTBPP, Swadaya, Swasta) Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur, 2021 dan 2022

Kabupaten	Jumlah (Wilayah)			Penyuluh Pertanian (Orang)				Jumlah (Orang)
	Kec	BPP	Desa	PNS	CPNS	TH-BPP	Swadaya	
Mojokerto (2021)	8	8	304	57	0	91	15	163
Mojokerto (2022)	8	8	304	54	0	89	14	158

Sumber : BPPSDMP, 2023 diolah

Jumlah penyuluh pertanian Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 cenderung kurang dan tidak ideal dengan jumlah desa binaan. Penyuluh pertanian berjumlah 163 orang yang terdiri dari 57 penyuluh PNS, 91 orang THL-TBPP dan 15 orang THL-TBPPD. Jumlah tersebut membina 298 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 1.112 kelompok tani dan 6 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang tersebar di 304 desa. Jumlah tersebut menunjukkan rata-rata seorang penyuluh membina hingga 4-5 desa. Jumlah penyuluh pertanian pada tahun 2022 berkurang dibandingkan tahun 2021 dan tidak ideal dengan jumlah desa binaan. Jumlah penyuluh pertanian Kabupaten Mojokerto sebanyak 158 orang yang terdiri dari 55 penyuluh PNS, 89 orang THL-TBPP dan 14 orang THL-TBPPD. Jumlah tersebut membina 298 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 1.112 kelompok tani dan 6 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang tersebar di 304 desa. Jumlah penyuluh pertanian Kota Mojokerto sebanyak 14 orang yang terdiri dari 10 penyuluh PNS, 2 orang THL-TBPP dan 2 orang THL-TBPPD. Jumlah tersebut membina 10 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 80 kelompok tani dan 1 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang tersebar di 18 desa. Jumlah tersebut menunjukkan rata-rata seorang penyuluh membina 5 desa.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari pernyataan Kepala Bagian Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto diketahui bahwa terdapat kekurangan formasi Penyuluh Pertanian. Kurangnya formasi penyuluh pertanian dan banyaknya penyuluh senior yang akan segera memasuki masa pensiun menyebabkan semangat kerja menurun sehingga pekerjaan memusat pada penyuluh junior, THL-TBPP dan THL-TBPPD yang mempunyai tanggungjawab dan kewenangan terbatas, frekuensi kunjungan ke poktan maupun gapoktan menjadi berkurang dikarenakan jumlah penyuluh dengan desa binaan yang tidak optimal, hal ini menjadi cikal bakal kinerja penyuluh menjadi rendah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kinerja penyuluh pertanian dengan judul “Analisis Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana analisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Mojokerto?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang serta perumusan masalah maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Mojokerto.

2. Mendeskripsikan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Mojokerto.
3. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Mojokerto.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritik**

Untuk memperoleh bukti-bukti data empiris tentang analisis kompetensi terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Mojokerto yang akan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan akademis mahasiswa di dalam bidang agribisnis.

##### **2. Manfaat Manajerial**

Penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan informasi dan sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel di dalam penelitian yaitu analisis kompetensi terhadap kinerja penyuluh pertanian.

##### **3. Manfaat Akademis**

- a. Bagi Universitas dan Ilmu Pemerintahan, mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan karya penelitian tentang faktor kompetensi penyuluh pertanian.
- b. Bagi mahasiswa/peneliti, menambah wawasan dan mengetahui alternatif dalam memecahkan beberapa masalah yang ada. Selain itu, dapat menjadi sarana pembelajaran dan pelatihan tentang tatacara dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan.
- c. Bagi mahasiswa maupun peneliti lain, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau acuan dalam melaksanakan penelitian lapang dan pembuatan laporan penelitian.